

TESIS

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

*The Effect of Government Accounting Standard, Information Technology, and
Internal audit on the Quality of Local Government Financial Reports with
Human Resources' Competence as a Moderating Variable*

**ZULKARNAIN NUR
A042191031**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

*Th Effect of Government Accounting Standard, Information Technology, and
Internal audit on the Quality of Local Government Financial Reports with
Human Resources' Competence as a Moderating Variable*

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

**ZULKARNAIN NUR
A042191031**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

disusun dan diajukan oleh

**ZULKARNAIN NUR
A042191031**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 18 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Amiruddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196410121989101001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP. 196503071994031003

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN


Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Zulkarnain Nur
NIM : A042191031
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Melassar, Agustus 2021
g Membuat Pernyataan

Zulkarnain Nur

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil Aalaamiin, kata yang paling patut penulis ucapkan tanda syukur kepada Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA** dan **Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si** selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;
5. **Dr. Muhammad Toaha, SE., MBA., Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA, Dr Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si** selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;

8. Teman, saudara seperjuangan **Kelas MKD Mamuju 2019** atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;
9. Pimpinan, Pejabat dan Rekan-rekan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), khususnya Bidang Akuntansi BPKAD Mamuju serta Para Pejabat Penatausahakeuangan (PPK) OPD dan Tenaga Akuntansi OPD Kabupaten Mamuju yang telah memberikan bantuan sebagai Sampel Penelitian serta doa dan dukungan selama penyusunan tesis ini;
10. Kakakku **Satryani Nur, SH., M.Kn.**, adik-adikku **Zulfadli Nur, SKM** dan **Panca Ipunk Rahdjie, SH** atas doa dan dukungan selama masa studi sampai selesai;
11. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Terkhusus dan teristimewa penulis sampaikan dengan kerendahan hati yang tulus kepada ibunda dan ayahanda tercinta **Hj. Senang Hati** dan **H. Muhammad Nur Museng**, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk pengorbanan, serta doa yang tak henti-hentinya untuk kami anak-anaknya. Semoga segala keringat, peluh, dan air mata yang kalian keluarkan senantiasa menjadi berkah dan mendapatkan balasan surga kelak. Aamiin. Selain itu, istriku **Ade Irma, SE** telah sabar menemani dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan tesis, anak-anakku **Zavier Adhitama Algio Nur, Zahira Alzena Ratifah Nur**, dan **Zanita Almira Rashikhah Nur** sebagai penghibur dan penyemangat saat rasa bosan melanda pada saat penyusunan tesis ini.

Sekali lagi, penulis menyadari akan ketidaksempurnaan tesis ini karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penyusunan karya ilmiah selanjutnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin....

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2021

Zulkarnain Nur

DAFTAR ISI

TESIS.....	i
TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori Stewardship	12
2.2 Kualitas Laporan Keuangan	13
2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP 71 Tahun 2010	18
2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	20
2.5. Peran Audit Internal	22
2.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	25
2.7. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	30
3.1 Kerangka Konseptual	30
3.2 Hipotesis	31
BAB IV METODE PENELITIAN.....	37
4.1 Rancangan Penelitian	37
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
4.3 Populasi dan Sampel	37
4.4 Jenis dan Sumber Data	38
4.5 Metode Pengumpulan Data	38
4.6 Metode Analisis Data.....	39

4.7 Definisi Operasional.....	44
BAB V HASIL PENELITIAN.....	53
5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
5.2 Hasil Analisis	55
5.2.1 Karakteristik Responden	55
a) Jenis Kelamin.....	56
b) Masa Kerja.....	57
c) Pendidikan Terakhir	58
d) Jabatan.....	58
e) Usia.....	59
5.2.2 Hasil Uji Kualitas Data.....	59
a) Uji Validitas	60
b) Uji Reliabilitas	61
c) Uji Statistik Deskriptif.....	62
d) Uji Hipotesis	63
BAB VI PEMBAHASAN.....	72
6.1 Pengaruh Pemahaman SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	73
6.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	74
6.3. Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan	75
6.4. Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Pemahaman SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan	76
6.5. Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	77
6.6. Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan	78
BAB VII PENUTUP.....	80
7.1 Kesimpulan	80
7.2 Keterbatasan Penelitian	81
7.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
Lampiran-Lampiran	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka konseptual	30
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2015-2019*	7
Tabel 2. Daftar SKPD yang menjadi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin	56
Tabel 3. Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kerja	57
Tabel 4. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	58
Tabel 5. Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan	58
Tabel 6. Karakteristik Responden berdasarkan Usia	59
Tabel 7. Hasil Uji Validitas*	60
Tabel 8. Hasil Uji Reabilitas*	62
Tabel 9. Statistik hasil uji deskriptif*	62
Tabel 10. Hasil Uji secara Koefisien Determinasi (R^2)	64
Tabel 11. Hasil uji secara Simultan (F)	64
Tabel 12. Hasil uji secara parsial (t)	66
Tabel 13. Hasil Uji secara Koefisien Determinasi (R^2) dengan Moderasi (Z)	68
Tabel 14. Hasil uji secara Simultan (F)	69
Tabel 15. Hasil uji secara parsial (t) dengan moderasi	70

ABSTRAK

ZULKARNAIN NUR. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Dibimbing oleh Amiruddin dan Syarifuddin Rasyid)*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis penggunaan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi Informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi.

Objek Penelitian pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 responden dari 45 SKPD yang ada di Kabupaten Mamuju. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan *moderated regression analysis*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi Informasi, dan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi hanya bisa meningkatkan penggunaan standar akuntansi pemerintahan, tetapi tidak dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Mamuju.

Melalui penelitian ini, pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dapat meningkatkan pelayanan dengan memaksimalkan penggunaan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Kata Kunci: standar akuntansi pemerintahan, teknologi Informasi, audit internal, kualitas laporan keuangan

ABSTRACT

ZULKARNAIN NUR. *The Effect of Government Accounting Standards, Information Technology, and Internal Audit on the Quality of Local Government Financial Reports with Human Resource Competence as Moderating Variable* (supervised by Amiruddin and Syarifuddin Rasyid)

This study aims to test and analyze the use of government accounting standards, use of information technology, and the role of internal audit on the quality of local government financial reports with human resource competence as a moderating variable.

The object of the research is the Mamuju Regency Government with the sample used in this study are 102 respondents from 45 SKPD in Mamuju Regency. The data used in this study is primary data, with the method of data collection is done by distributing questionnaires. Data were analyzed using moderated regression analysis (MRA).

The results of hypothesis testing indicate that the simultaneous use of government accounting standards, the use of information technology, and the role of internal audit have a positive effect on the quality of local government financial reports. However, human resource competence as a moderating variable can only increase the use of government accounting standards, but cannot increase the use of information technology, and the role of internal audit on the quality of local government financial reports in Mamuju Regency.

Through this research, the local government of Mamuju Regency can improve services by maximizing the use of government accounting standards, utilization of information technology, and internal auditing on the quality of local government financial reports with better quality human resources.

Keywords: *government accounting standards, information technology, internal audit, quality of financial reports*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma sistem pemerintahan di Indonesia saat ini mengalami perubahan yaitu dari sentralistik menuju desentralistik dimana dampaknya pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pemerintahan sentralistik lebih menekankan peran pemerintah pusat dalam menentukan arah dan semua aspek dalam pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, berbeda dengan sistem pemerintahan desentralistik yang merupakan sistem pemerintahan yang mengedepankan peran dari langsung daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya. Sistem tersebut juga menjadikan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mendorong dan menggerakkan arah pembangunan di Indonesia sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam menggerakkan pembangunan daerah. Seiring dengan pemberian kewajiban yang lebih besar tersebut, pemerintah daerah juga diberikan hak dan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya, termasuk dalam hal pengelolaan kekayaan alam dan keuangan daerah. Kewajiban, hak, dan kewenangan daerah dalam mengelola daerahnya secara independen tersebut disebut sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan porsi kewenangan yang besar kepada Pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah masing-masing. Pemerintah daerah diberi hak dan wewenang, sekaligus kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pelaporan keuangan pemerintah

daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah (Indriasari dan Erlambang, 2008). Salamun (2007) menyatakan bahwa asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, asumsi dasar tersebut meliputi asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang. Pelaporan keuangan sektor publik juga disusun atas dasar prinsip-prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berkaitan dengan entitas pelaporan, Halim (2007) menyebutkan bahwa pada ketentuan terdahulu terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah dalam menentukan entitas pelaporan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 96-100 menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah laporan keuangan. Dalam kinerja pemerintahan, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama tahun anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah daerah, kota, atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan.

Pelaporan keuangan di pemerintahan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, serta memberikan gambaran informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi dalam pengambilan keputusan sesuai prinsip-prinsip akuntansi.

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemahaman akan SAP sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Menurut Nordiawan (2006) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara SAP pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun di departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan

untuk operasi berkelanjutan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. PP 71 Tahun 2010, menerangkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD. Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, transparansi dan evaluasi kinerja.

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem pengelompokan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan (Yuliani, dkk, 2010).

Menurut Arfianti (2011), dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan komponen utama yang memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Seperti diketahui bahwa total volume APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah mewajibkan pemanfaatan teknologi informasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Wilkinson *et al* (2000) teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Laporan keuangan daerah hingga saat ini juga masih mengalami kendala dalam proses penyusunannya. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM (Sumber Daya Manusia) pada masing-masing SKPD, dalam hal ini adalah aparatur daerah. Kenyataannya, banyak pihak yang bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Hal tersebut menjadi kendala bagi pihak aparatur daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dikarenakan pegawai belum sepenuhnya siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak

memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), oleh karena itu diperlukan pengendalian intern.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pada tingkatan organisasi tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (Anggraeni, 2014).

Ada lima komponen dalam membangun pengendalian intern yaitu (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) aktivitas pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, (e) monitoring (Bodnar dan Hoopwod, 2000; PP Nomor 60 Tahun 2008; Arens *et al*, 2012).

Simanjuntak (2005) menyatakan SDM merupakan faktor penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SPIP dan SAP adalah manusia. SKPD harus memiliki SDM yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan daerah menjadi baik, dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku SDM yang bersangkutan (Ruky, 2003; Sudarmanto, 2009; Indriasih, 2014).

Sudarmanto (2009) menyatakan bahwa SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-

manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM), PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (Suhardjo dan Adhi, 2013).

Hasil pengawasan atas kualitas akuntabilitas keuangan daerah sejak diberlakukannya *accrual basis* dalam penyusunan laporan keuangan yaitu pada tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju. Ukuran akuntabilitas pelaporan keuangan ditunjukkan dari opini yang diberikan oleh auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah.

Tabel 1.1
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2015-2019*

LKPD TAHUN	OPINI BPK RI
2015	WTP
2016	WDP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2020.

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Mamuju yang kembali meraih WTP selama 3 tahun terakhir, setelah sempat turun pada tahun 2016 bukan berarti tidak ada kekurangan dalam penyajian laporan keuangan ataupun bebas dari

penyimpangan. Fenomena yang terjadi jika dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih terdapat temuan yang harus diperbaiki baik itu ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya belum diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan, pemahaman akuntansi, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, serta peran audit internal yang masih lemah.

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, maka peneliti perlu mengkaji secara mendalam pada Pemerintah Kabupaten Mamuju. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan pemerintah daerah antara lain pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal. Tujuannya adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh masing-masing terhadap kualitas laporan keuangan.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulistyoratih dan Riharjo (2019), Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah keterandalan pelaporan keuangan daerah. Penelitian yang akan dilakukan ini sifatnya pengembangan dari penelitian tersebut dan yang menjadi pembeda adalah menambahkan standar akuntansi pemerintahan

sebagai variabel independen dengan pertimbangan bahwa pemahaman akan SAP sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan daerah, karena prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yaitu SAP dan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kompetensi SDM dijadikan sebagai variabel moderasi, dengan pertimbangan bahwa SDM bisa menjadi sebuah pengaruh yang kuat dalam memahami SAP, memanfaatkan teknologi informasi, serta peranannya dalam audit internal untuk menghasilkan output berkualitas yaitu laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Mamuju”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju?

3. Apakah peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju?
4. Apakah kompetensi SDM memoderasi pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju?
5. Apakah kompetensi SDM memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju?
6. Apakah kompetensi SDM memoderasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kondisi permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.

4. Untuk menguji dan menganalisis kompetensi SDM memoderasi pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.
5. Untuk menguji dan menganalisis kompetensi SDM memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.
6. Untuk menguji dan menganalisis kompetensi SDM memoderasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) **Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah literatur dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan menambah referensi penelitian di sektor publik.

b) **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang andal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Fajar (2012) mengungkapkan bahwa *Stewardship theory* adalah teori yang menggambarkan situs dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* atau disebut juga teori pengabdian atau pelayanan merupakan teori yang didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah manfaatnya ke teori *stewardship* yaitu informasi lebih berkualitas, berdasarkan teori ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan teori *stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Pemerintah daerah selaku manajer wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan

teori *stewardship* ini, kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD serta opini LKPD yang diperoleh pemerintah daerah.

Dalam teori *stewardship*, manajer akan menampilkan perilaku yang sesuai bagi kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan mengalah dan berusaha bekerja sama daripada menentangnya karena steward merasa kepentingan bersama serta berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional dan steward lebih mementingkan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Teori ini sangat cocok diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi publik di mana steward diposisikan sebagai pemerintah daerah dan *principals* sebagai publik serta para pengambil keputusan. Dalam hal ini kualitas laporan keuangan yang akan digunakan oleh publik dan para pengambil keputusan.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasian

dokumen, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun.

Bastian (2010) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

2.2.4 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan untuk informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

2.2.5 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventaris, aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

2.2.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan pada tahun sebelumnya.

2.2.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Laporan keuangan merupakan rincian dari masing-masing akun transaksi yang saling berhubungan antara akun yang satu dengan yang lain.

Kualitas laporan keuangan sangat diperlukan demi terbentuknya pemerintahan yang baik. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Jonas dan Blanchett (2000)

kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maka harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penerapan SAP berbasis akrual ditetapkan tanggal 22 Oktober 2010 sedangkan SAP berbasis kas menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksiapan ini terjadi karena:

- a. kemampuan SDM yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 yang belum intensif;
- c. belum diterbitkannya peraturan daerah tentang penerapan akuntansi berbasis akrual;
- d. belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang mendukung terlaksananya penerapan akuntansi berbasis akrual

Menurut Afiah (2009) akuntansi pemerintahan memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas dari pada sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.

b. Manajerial

Selain tujuan akuntabilitas, akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Akuntansi

pemerintahan memungkinkan pemerintahan untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi.

c. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk memperoleh, memproses dan menyimpan informasi yang berkualitas juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe*, *mini*, *micro*), perangkat lunak

(*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000).

Dalam penjelasan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan pemerintah pusat dan pemda berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi, utamanya tentang sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sistem informasi yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi pemerintah yang menetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai serta

pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Ridwan, 2012).

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Halim (2007), akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan kinerja pemerintah daerah.

2.5. Peran Audit Internal

Audit internal atau Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Menurut *Commite of American Institute of Accountant* (AICPA) yang dikutip Bastian (2010) menjelaskan pengendalian *intern* sebagai rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut oleh perusahaan untuk melindungi harta, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang independen dalam organisasi untuk meninjau kembali operasi sebagai jasa yang diberikan kepada manajemen. Menurut Mulyadi (2002), internal audit adalah auditor yang bekerja di dalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan diterapkan oleh manajemen yang telah dipatuhi, menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi serta prosedur aktivitas kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian-bagian dari entitas atau organisasi.

Audit internal bertujuan untuk membantu entitas organisasi supaya bisa melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. Audit internal akan menganalisis, mengajukan beberapa saran dan penilaian. Pemeriksaan juga mencakup pengawasan efektif dengan biaya yang wajar. Tujuan utama dari audit internal

adalah membantu pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Dalam penyusunan laporan keuangan peran audit internal sangat diperlukan dalam membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya dengan menganalisis, menilai dan memberi saran serta komentar tentang aktivitas yang diperiksa dalam pembuatan laporan keuangan. Dengan demikian peran audit internal sangat perlu demi menjamin kualitas laporan keuangan yang diinginkan.

Menurut Setyo (2013), audit internal tidak diperkenankan untuk menerima tanggung jawab atas fungsi-fungsi atau tugas-tugas non audit yang secara periodik menjadi objek penelitian audit internal. Peran audit internal dapat dilihat sebagai nilai tambah dalam meningkatkan efektivitas dari tata kelola organisasi pemerintahan. Auditor internal senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

Internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian *internal auditing* membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

2.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya.

Joseph Riwukaho dalam Widodo (2015) mengemukakan bahwa SDM merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi otonomi daerah. Sumber Daya Manusia atau personalia merupakan faktor determinan yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah selain factor pembiayaan dan prasarana.

Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni: (1) Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. (2) Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. (3) Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi, (4) Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. (5) Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah: kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Pengembangan kompetensi aparatur dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan. Pelatihan menurut Smith (2000) adalah proses terencana untuk mengubah sikap/perilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang efektif dalam suatu kegiatan. Pendidikan dan pelatihan pegawai diberikan secara berkala sehingga dapat terpelihara kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi (Donalson dan Scannel, 1993).

Menurut Tjiptoherijanto dalam Indriasari dan Erlambang (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010) ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu:

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan).
- b. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan

laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dan Dahana, 2010).

Dalam Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah (Warisno dan Dahana, 2010).

2.7. Penelitian Terdahulu

Efendi, Darwanis, dan Abdullah (2017) menyimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Hanaffi (2017) menyimpulkan bahwa pemahaman SAP, peran internal audit, dan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati Tetapi pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati.

Anggraeini (2014) menunjukkan bahwa kualitas SDM dan pengawasan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemda sedangkan pemanfaatan TI dan sistem pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Sukmaningrum dan Harto (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Suhardjo dan Adhi (2013) menemukan penerapan SAP dan kualitas aparatur berpengaruh terhadap kualitas LKPD, tidak terdapat hubungan moderasi antara penerapan SAP dengan kualitas aparatur terhadap kualitas LKPD. Sedangkan penelitian Indriasih (2014) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah dan efektivitas SPIP menjadi penyebab utama lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sukmaningrum dan Harto (2012) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.